



Penerapan Layanan Pemasyarakatan Berbasis TIK

Disampaikan pada

Rapat Koordinasi Teknis Pemasyarakatan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Sulawesi Utara

30 September 2015



BIO DATA

- ❖ Nama Lengkap : **Antonius PG Manginsela**
- ❖ Tempat/Tgl.Lahir : Yogyakarta/27 Desember 1963
- ❖ Riwayat Pendidikan :
 - Diploma 3 & S1 : Teknik Elektro
 - S2 Manajemen : *Knowledge Management dan Audit IT.*
- ❖ Riwayat Pekerjaan :
 - Dosen Tetap Politeknik Negeri Manado
 - Kepala UPT Teknologi Informasi & Komunikasi Politeknik Negeri Manado
- ❖ Riwayat Pelatihan :
 - TOT Java Education,
 - TOT CCNA (Cisco Network)
 - Training on Elearning & Multimedia Utilization for Education, Jakarta Institute of Technology
 - TOT - Senior Teacher Intel Education
- ❖ Pembicara Pertemuan Ilmiah :
 - Workshop on Master Teacher Untuk Pemberdayaan ICT Bagi KKG/MGMP Provinsi Sulawesi Utara, (Pembicara)
 - International Conference on Facilities and Financing of Entrepreneurship Training (Pembicara)
 - Pelatihan Metodologi Pembelajaran Dengan Metode Pendekatan Terapan Politeknik Negeri Manado (Pembicara)



TOPIK BAHASAN

1

DEFINISI & PERKEMBANGAN TIK

2

KEBUTUHAN PENERAPAN TIK

3

PELAYANAN PRIMA DITJEN PAS
(Materi Rakornis Pas Ditjen Pas – Prof.Marsudi)

4

PRAKTIK BAIK DALAM PENERAPAN TIK



1. 1. DEFINISI TIK

- ❖ **Teknologi Informasi dan Komunikasi**, peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi.
- ❖ TIK terdiri : **Teknologi Informasi** dan **teknologi Komunikasi**.
- ❖ **Teknologi informasi** : proses, penggunaan alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi.
- ❖ **Teknologi komunikasi** : penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya.
- ❖ **Jadi TIK** : *kegiatan yang menggunakan alat yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media, dan tempat.*



1.2. Perkembangan TIK

❖ Global

- Cloud Computing
- Mobile Application
- User Interfaces
- Analytics (data analytics, predictive analytics and social media analytics – *Kombinasi pemrograman komputer, statistik dan metode operasi riset*)

❖ Indonesia

- e-Government
- Cloud Computing
- Mobile Computing : Gawai/Gadget, BYOD, SosMed
- Penetrasi Internet hingga daerah pedesaan



2.1 KEBUTUHAN PENERAPAN TIK

❖ Regulasi Pemerintah

- Reformasi Birokrasi (*PerMenPan No.11,2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi, 2015-2019*)
- Kebijakan e-Government (*INPRES No.3, 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Governmet*)
- Peraturan & Kebijakan Kemenkumham

❖ Perkembangan Teknologi Informasi & Komunikasi

❖ Peningkatan kualitas layanan publik pada instansi pemerintah.

❖ Pengolahan fakta → data → informasi dari suatu organisasi.



Aliran & Hirarki Informasi

- ❖ Sub Bagian Tata Usaha :
 - Urusan Kepegawaian & Keuangan;
 - Urusan Umum
 - Evaluasi dan pelaporan
- ❖ Seksi Pembinaan Napi/Anak Didik :
 - Registrasi, membuat statistik & dokumentasi
 - Bimbingan masyarakat, kesehatan dan perawatan
- ❖ Seksi Kegiatan Kerja :
 - Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja;
 - Sub Seksi Sarana Kerja
- ❖ Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib :
 - Jadwal, perlengkapan & pembagian tugas pengamanan.
 - Pelaporan dan Tata tertib : laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan



Penerapan TIK dalam LP

- ❖ Bagaimana mengelola fakta, data, informasi menjadi pengetahuan sebagai dasar pembuatan kebijakan mikro maupun makro.
- ❖ Bagaimana LP menyesuaikan diri dengan kondisi external dan internal.
- ❖ Bagaimana peran Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam tupoksi LP



3. Layanan Pemasyarakatan Prima dengan TIK Ditjen Pemasyarakatan

Penggunaan perangkat TIK modern dalam pengelolaan layanan prima pemasyarakatan, yaitu meliputi:

- Komputerisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan unit-unit di lingkungan Ditjen Pas;
- Komputerisasi layanan-layanan publik kepada seluruh pemangku kepentingan Ditjen Pas, termasuk integrasi dengan berbagai lembaga maupun organisasi di luar Ditjen Pas;
- Menyediakan akses layanan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan



Karakteristik Layanan Prima Pemasarakatan

- ❖ Merupakan suatu mekanisme interaksi baru (moderen) antara Ditjen Pas dengan masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya; dimana ***Melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi modern (komputer, telekomunikasi, internet, gawai, dll); dengan tujuan utama untuk :***
 - Meningkatkan kualitas layanan publik Ditjen Pas
 - Memperbaiki kualitas pelayanan Ditjen Pas kepada kepentingannya terutama dalam hal efektivitas dan efisiensi kinerja di berbagai bidang kehidupan bernegara
 - Meningkatkan transparansi, kontrol & akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Governance di lingkungan Ditjen Pas (bebas KKN);



Manfaat Layanan Prima Masyarakat (*internal forces*)

- ❖ Meningkatkan kualitas layanan publik Ditjen Pas
- ❖ Memperbaiki kualitas pelayanan Ditjen Pas kepada kepentingannya terutama dalam hal efektivitas dan efisiensi kinerja di berbagai bidang kehidupan bernegara
- ❖ Meningkatkan transparansi, kontrol & akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Governance di lingkungan Ditjen Pas (bebas KKN);
- ❖ Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi dan interaksi yang dikeluarkan Ditjen Pas maupun pemangku kepentingannya untuk keperluan aktifitas sehari-hari.
- ❖ Memberikan peluang bagi Ditjen Pas untuk mendapatkan nilai tambah baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak berkepentingan
- ❖ Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada
- ❖ Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.



Manfaat Layanan Prima Masyarakat (*External forces*)

- ❖ Desakan globalisasi dan keterbukaan - Ditjen Pas harus menyediakan lingkungan kondusif
- ❖ Tuntutan demokrasi dan transparansi – Ditjen Pas harus responsive
- ❖ Penerapan good governance – Ditjen Pas harus memperhatikan aspek-aspek **F**airness, **I**ndependency, **T**ransparency, **R**esponsibility, **A**ccountability dan **H**onesty (**FITRAH**)
- ❖ Alokasi beragam sumber daya yang terbatas – Ditjen Pas harus memiliki landasan berpijak dalam membuat kebijakan
- ❖ Implementasi *Knowledge-based society* – Ditjen Pas harus merubah paradigma (transformasi fungsi)



LAPISAN KOMPONEN LAYANAN PRIMA

PEOPLE (USER)

PROCESS (APPLICATION)

TOOLS (TECHNOLOGY)

**LAYANAN PRIMA
PEMASYARAKATAN**



Data Sistem Kemenkumham

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

EXISTING SISTEM DATABASE PEMASYARAKATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2014



Pengembangan SDP
menjadi SIMPAS



Kebijakan Pengembangan



Pengembangan SDP
menjadi SIMPAS



Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

PENGEMBANGAN SDP LITMAS MENJADI SIMPAS



3.2 PENDEKATAN PENERAPAN

❖ Hirarki :

- Top-Down (Jenjang organisasi) : Pelaporan, Pengambilan Keputusan
- Bottom – Up (Model Proses Organisasi) : Fungsi Unit Organisasi

❖ Konsep :

- Berorientasi pada fungsi sistem melalui identifikasi proses-proses dan informasi apa saja yang nantinya dihasilkan oleh sistem atau aplikasi TIK (Automation Process)
- Berorientasi pada luaran / output sistem untuk pengambilan keputusan (Decision Support System)



Strategi Penerapan TIK

❖ Bentuk :

- Try and error (Dilakukan jika kurangnya sumber daya tim pengembang internal dan pengembangan bersifat parsial)
- *Framework* - mengikuti rencana dan tahapan berdasarkan konsep praktik baik yang dilakukan sebelumnya.

❖ Langkah penerapan :

- Outsourcing (Alih sumber daya)
- Internal Development (Pengembangan secara internal)

❖ Kata Kunci :

- Efisiensi
- Efektifitas



Pertimbangan Penerapan TIK

- ❖ *Dinamika Organisasi (Membangun sistem yang mandiri)*
- ❖ *Manajemen Perubahan Organisasi (setiap individu di dalam organisasi mampu beradaptasi secara proporsional dengan gesekan seminimal mungkin)*
- ❖ *Ketersediaan Sumber Daya (Bersikap realistis terhadap ketersediaan sumber daya)*
- ❖ *Keterkaitan dengan Pihak-Pihak Eksternal (memiliki kontribusi positif atau mungkin negatif)*
- ❖ *Dinamika dan Perubahan di Bidang Teknologi (melakukan kalkulasi yang cermat dan menyeluruh dalam memilih teknologi)*



PRAKTIK BAIK DALAM PENERAPAN TIK

- ❖ Pendekatan yang rasional
- ❖ Pertimbangan sumber daya
- ❖ Perencanaan yang terpadu
- ❖ Target kinerja yang jelas (Key Performance Indicator)
- ❖ Mempunyai mekanisme evaluasi berdasarkan kinerja
- ❖ Kesiambungan dukungan sumber daya



Referensi

- ❖ Materi Rakornis, - Layanan Masyarakat Prima dengan Teknologi Informasi – Prof.Dr.Ir.Marsudi W.Kisworo,
- ❖ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01.Pr.07.03 Tahun 1985, tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.
- ❖ Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia Nomor m.hh-05.0t.01.01 tahun 2011 Tentang Perubahan atas keputusan menteri kehakiman Nomor m.01-pr.07.03 tahun 1985 tentang organisasi Dan tata kerja lembaga pemasyarakatan
- ❖ Sistem Informasi Lembaga Pemasyarakatan : Studi Kasus : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Blitar, Gianar Wirawan Kusuma & Dedy Rahman Prehanto





Terima Kasih

anton@polimdo.ac.id

081244886896

